

Kurikulum Pendidikan Dasar Menyongsong Abad Informasi: Sebuah Pemikiran Tentang Kurikulum Sekolah Dasar

T. Raka JONI

Pengantar

TELAH lahirnya Undang-undang mengenai Sistem Pendidikan Nasional 1989 (USPN 1989) serta Peraturan Pemerintah No. 28/1980 mengenai Pendidikan Dasar, di samping telah cukup lamanya kurikulum yang sekarang berlaku, telah memicu kegiatan penyempurnaan kurikulum oleh aparat Depdikbud yang terkait. Sementara di pihak lain, setidaknya di waktu-waktu yang lampau, penyempurnaan kurikulum adalah lebih berkesan sebagai "bongkar-pasang mata pelajaran" yang implementasinya pun tidak jauh berbeda satu sama lain; yaitu, pemberian informasi yang bersumber dari buku-buku teks yang penguasaannya kemudian ditagih melalui ujian-ujian yang terutama mempersyaratkan hafalan.

Tulisan ini tidak bermaksud untuk -- secara serta-merta -- mengusulkan penambahan atau pengurangan mata atau bahan pelajaran. Sebaliknya, kesempatan ini ingin dipergunakan untuk mengemukakan sebuah

cara memandang dan memperlakukan kurikulum berlandaskan pada kajian kritikal terhadap aspek-aspek yang lebih mendasar: mulai dari latar kemasyarakatannya sampai dengan harapan-harapan yang ditumpukan pada pendidikan melalui sistem persekolahan maupun pengemasan pesan-pesannya ke dalam bentuk pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa sebagai pebelajar, di samping dilihat dari segi misi pendidikan sebagai bentuk utama upaya pengembangan sumber daya manusia. Hal ini penting ditekankan oleh karena nyaris selalu terjadi "pengebirian pesan" di dalam penyelenggaraan program pendidikan. Yaitu, akibat kekurangajekan antara hajat yang diniati berbagai pihak yang merupakan sumber pesan dan program yang kemudian secara formal ditetapkan yang -- mestinya -- bertolak dari sumber tersebut, serta perwujudannya sebagai pengalaman belajar yang dihayati subyek didik yang -- mestinya -- merupakan penjabaran dari program yang telah secara formal ditetapkan.

Pada gilirannya, kekurangajekan penerjemahan pesan-pesan kependidikan melalui

berbagai program pengajaran yang dapat ditelusuri dari kesimpangsiuran harapan yang ditumpukan pada pendidikan, seperti: tenaga kerja siap pakai, pencipta lapangan kerja, perebut ilmu dan teknologi, pembawa nilai tambah, dan sebagainya, menyarankan pentingnya dimiliki acuan konseptual yang mantap mengenai hakikat dan misi pendidikan melalui sistem persekolahan, termasuk yang diselenggarakan di jenjang sekolah dasar sebagai bagian dari pendidikan dasar 9 tahun, di samping terselenggarakannya pengelolaan program-program tersebut secara berhasil serta berdaya guna.

Oleh karena itu, tulisan ini akan menonjolkan pentingnya pendekatan sistematis-sistemik dalam merumuskan acuan konseptual yang diperlukan untuk merancang serta mengimplementasikan kurikulum, termasuk kurikulum sekolah dasar, sebagai skenario dasar bagi penyelenggaraan program pengajaran yang mendidik. Dalam pada itu, perlu ditambahkan bahwa dalam penerapannya, pendekatan ini masih memerlukan pematapan-pematapan, terutama dari segi pengayaan substantif, di dalam menetapkan acuan konseptualnya dengan memanfaatkan masukan dari berbagai pihak terkait, baik dalam bentuk hasil kajian empirik dan pendapat ahli maupun yang berupa pilihan nilai dari masyarakat dan pemerintah.

Acuan Konseptual dalam Pengembangan Kurikulum

Secara prosedural, pendekatan sistematis-sistemik berarti dianutnya proses berpikir yang tertata dan sesuai dengan kaidah-kaidah analisis sistem, sedangkan secara substantif sistem yang digunakan sebagai acuan adalah latar kemasyarakatan, kebudayaan serta kelembagaan Indonesia.

Manusia dan Masyarakat Indonesia Masa Depan yang Dikehendaki¹

Untuk dapat beranjak kepada keadaan yang dikehendaki, kita harus berangkat dari keadaan sekarang. Apabila akan ditunjukkan ciri paling penting dari masyarakat kita sekarang yang relevan dengan pembicaraan ini, maka pilihan barangkali harus dijatuhkan pada "kebhinekaan", bukan sekedar dalam kesatuan makna "bhineka tunggal ika", melainkan terutama dari segi taraf perkembangannya, yang memiliki rentangan sosio-kultural sangat fantastis: mulai dari masyarakat pedalaman Irian Jaya yang praktis masih terisolasi, sampai dengan lapisan paling canggih dari masyarakat metropolitan DKI Jakarta Raya. Padahal di pihak lain, bukan hanya sebagai nikmat dan sekaligus kewajiban kemerdekaan, melainkan juga sebagai prasyarat bagi kelangsungan hidup kita sebagai negara-bangsa, maka kesempatan untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu harus diberikan kepada setiap warga negara. Dengan perkataan lain, kita harus memandang dan memperlakukan segenap warga negara sebagai sumber daya manusia nasional.

Ruangan yang tersedia tidak akan memadai, dan kesempatan ini mungkin bukan yang terbaik, untuk merinci secara lebih lengkap ciri-ciri masyarakat Indonesia sekarang, dari Sabang sampai Merauke. Agaknya memadai apabila untuk keperluan ini dinyatakan bahwa tingkatan heteroginitasnya sangat tinggi, baik dari segi potensi, motivasi maupun latar belakang sosial-ekonomi, sehingga untuk membawanya kepada keadaan serta ciri-ciri masyarakat yang

¹Diambil dari T. Raka Joni, "Mereka Masa Depan, Sekarang", Ceramah Ilmiah Lustrum VII IKIP Malang, 18 Oktober 1989.

dikehendaki, diperlukan upaya yang berlipat ganda beratnya, apabila dibandingkan dengan keadaan seandainya seluruh tanah air ada pada taraf perkembangan yang sama. Pendekatan serta perangkat upaya yang diperlukan bagi pengembangan masyarakat pedalaman Irian Jaya, harus berbeda dari pendekatan serta upaya yang diperlukan bagi pengembangan masyarakat DKI Jakarta Raya. Juga sama pentingnya diingat adalah betapapun keragaman titik-titik berangkat kemasyarakatan yang berlaku, namun sasaran pengembangannya adalah sama, yaitu masyarakat modern Indonesia yang berkepribadian Pancasila sebagai jati diri manusia dan masyarakat Indonesia.

Pada gilirannya, sesuai dengan pandangan hidup bangsa, kaitan fungsional individu-dalam-masyarakat merupakan salah satu gagasan kunci dalam memahami apa yang diketahui, dalam menggambarkan apa yang dicita-citakan maupun yang bisa dicapai, serta dalam merekayasa apa yang dapat dan perlu diperbuat, untuk berangkat dari keadaan sekarang menuju keadaan yang dikehendaki.

Ini berarti bahwa pendidikan dilihat lebih daripada sekedar proses sosialisasi yang hanya menyiapkan individu untuk hidup menyesuaikan diri kepada masyarakat, melainkan juga sebagai kekuatan yang secara sistematis dapat mengubah masyarakat melalui penyiapan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan.

Ada banyak sudut pandangan yang perlu dipergunakan dalam menyimak permasalahan yang kompleks yang merupakan wajah keadaan yang kini berlaku. Dari segi ekonomi, produktivitas kita masih rendah karena sebagian besar angkatan kerja kita masih berpendidikan rendah serta terlibat dalam bidang pertanian yang lebih ditujukan pada

kebutuhan sendiri dan tidak berorientasi ekspor, sehingga jumlah penduduk yang besar masih lebih merupakan beban daripada pendorong peningkatan pembangunan. Dari segi ilmu dan teknologi, kita masih lebih merupakan konsumen daripada pencipta. Dari segi kultural, kita masih lebih banyak berorientasi masa lalu daripada mengantisipasi masa depan.

Dalam pada itu, menyongsong masyarakat masa depan yang dikehendaki, sementara pakar kajian masa depan mengisyaratkan bahwa kita harus menghadapi revolusi industri dan revolusi informasi secara bersamaan. Ini berarti bahwa di samping harus mampu mengejar ketinggalan-ketinggalan di bidang ilmu dan teknologi yang merupakan tumpuan industri serta menanggalkan gaya hidup abad pertanian, maka kita juga harus secara sadar berpikir dan bertindak sesuai dengan tuntutan abad informasi, bahkan ikut mengarahkan perkembangan masyarakat abad informasi, sesuai dengan pandangan hidup bangsa. Dengan perkataan lain, kita akan bisa bertahan sebagai negara bangsa yang menentukan masa depannya sendiri, apabila kita mampu menangani maupun ikut menciptakan informasi terlebih-lebih yang bersifat strategis. Misalnya yang berkenaan dengan peta kekayaan alam tanah air, pengembangan cara kerja dan produksi di berbagai bidang, khususnya yang menyangkut kelestarian serta kejayaan negara-bangsa, di samping menguasai sistem pengkomunikasian baik untuk keperluan di dalam negeri maupun demi pergaulan antar bangsa.

Oleh karena itu, arah perkembangan di waktu-waktu mendatang diperkirakan akan ditandai oleh ciri-ciri sebagai berikut: perkembangan ilmu dan teknologi yang pesat tanpa dapat dihambat akan merasuk ke se-

gala penjuror dunia, terutama dalam bentuk informasi melalui sistem telekomunikasi yang menyebabkan bola dunia seolah-olah mengerut; terjadi perubahan cara kerja dan gaya hidup yang merupakan bawaan dari perkembangan ilmu dan teknologi, khususnya yang sekarang menghadirkan diri dalam kerangka acuan abad informasi; tata nilai yang mapan dilanda oleh nilai-nilai baru yang mengiringi perubahan cara kerja, cara pikir, dan gaya hidup yang masih mencari-cari bentuk.

Ancaman terhadap kelangsungan hidup umat manusia dapat mengambil pelbagai bentuk. Di samping yang sudah lebih luas dikenal seperti ancaman perang nuklir (yang dengan kehadiran Michael Gorbachev menunjukkan tanda-tanda peredaan yang berarti, meskipun masih ada kemungkinan muncul kembali dalam wujud lain seperti pertentangan regional yang belakangan terjadi di kawasan Teluk Persia); perusakan lingkungan oleh perluasan industri yang belum berwawasan lingkungan; dan bahkan kemungkinan dampak sampingan negatif dari peningkatan kemampuan manusia mengutak-atik sistem ragawinya sendiri melalui rekayasa genetika; juga tidak kalah bahayanya adalah pemanfaatan teknologi yang secara sepintas tampaknya seperti tidak berdosa demi memberikan kenikmatan hidup; yaitu, mulai dari alat kecantikan yang dikemas dalam kaleng aerosol sampai dengan berbagai mesin yang menggunakan bahan bakar minyak bumi, yang ternyata berakibat menggerogoti lapisan ozon pelindung bumi dari terpaan sinar ultraviolet matahari, dengan segala kemungkinan dampak negatif yang ditimbulkannya; yaitu mulai dari kanker kulit sampai dengan tenggelamnya daerah-daerah rendah di berbagai bagian dunia. Yang lebih pesimistis bahkan secara lugas menyatakan bahaya "people polute"

sehingga penambahan penduduk diidentikkan dengan penambahan pengotoran lingkungan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa untuk kelangsungan hidup yang manusiawi di muka bumi ini, diperlukan tatanan kehidupan baru yang ditandai oleh pemenuhan layak atas kebutuhan manusia material dan spiritual serta dipersempitnya jurang antara yang kaya dan yang miskin, baik antar negara maupun intra-negara, tanpa merusak kelestarian lingkungan. Dengan perkataan lain, diperlukan keseimbangan antara upaya peningkatan pemenuhan kebutuhan manusia melalui pembangunan dengan kelestarian lingkungan yang pada gilirannya, justru akan menentukan kelestarian eksistensi manusia itu sendiri. Jalan masih panjang dan perjuangan berat masih perlu dilakukan untuk meyakinkan semua pihak bahwa untuk dapat hidup layak di muka bumi ini, mutlak diperlukan kerja sama yang didasarkan pada keadilan sosial dan kelestarian lingkungan. Kita hanya cukup menyimak pelbagai perbedaan pendapat serta persengketaan antar bangsa yang terjadi, sebagian bahkan berlarut-larut berkepanjangan, dua contoh terakhir adalah keseretan upaya menstabilkan harga minyak bumi dan krisis Teluk Persia, untuk menyadari bahwa diperlukan pikiran yang tajam serta pandangan jauh ke depan untuk membedakan antara kepentingan nasional yang adil dengan keuntungan jangka pendek yang lebih diwarnai oleh kekurangluasan pandangan.

Juga penting disimak dalam hubungan ini adalah bahwa perbuatan perorangan ternyata berdampak global, sehingga sebagai akibatnya, penanganan masalah-masalah yang bersifat global itu pada dasarnya mempersyaratkan perubahan acuan di dalam

pengambilan keputusan dan tindakan oleh setiap individu dalam arti yang sebenarnya. Artinya, pemecahan permasalahan yang bersifat global harus dimulai penanganannya dari tingkat individual, yang mengisyaratkan pentingnya peranan potensial, dan sekaligus tanggung jawab pendidikan untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang ditandai oleh partisipasi dan perseptujuan yang bertolak dari pemahaman (*informed consent*) yang diberikan berdasarkan kemampuan berpikir mandiri serta perasaan tanggung jawab oleh segenap warga negara. Dengan perkataan lain, salah satu ciri khas abad informasi adalah globalisasi yang berkaitan erat dengan individualisasi yaitu dengan keberhasilan "... *individual responsibility against the anonymity of the collective*"²

Namun sebelum kita dapat secara produktif berbicara tentang karakteristik pendidikan yang dikehendaki, kita perlu secara eksplisit menyimak sasaran pembentukannya. Dengan perkataan lain, maka perlu mengkaji karakteristik manusia berdasarkan karakteristik masyarakat Indonesia masa depan yang dikehendaki, yang secara singkat telah dikemukakan sebelumnya.

Dari GBHN ke BGHN telah dituangkan perangkat komprehensif karakteristik manusia Indonesia yang harus diwujudkan, meskipun rumusannya dengan sendirinya lebih bersifat umum sesuai dengan sifatnya sebagai kebijaksanaan yang bersifat garis-garis besar. Demikian juga rumusan tujuan pendidikan di dalam USPN 1989 dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1990 tentang pendidikan dasar masih belum memberikan panduan operasional yang cukup rinci untuk menjabarkan serta menyelenggarakan

program pengajaran yang mendidik dari hari ke hari.

Maka masih diperlukan upaya yang eksplisit untuk menerjemahkannya menjadi tujuan pendidikan institusional, yang secara cukup jelas mengisyaratkan baik karakteristik yang dikehendaki dari lulusannya maupun, tidak kalah pentingnya, proses pembentukan karakteristik tersebut melalui upaya pendidikan.

Salah satu langkah awal ke arah rumusan tujuan pendidikan yang lebih operasional dikemukakan oleh Emil Salim, dengan menyatakan bahwa mutu manusia Indonesia harus ditingkatkan dalam 3 segi: yaitu, spiritual, kemasyarakatan dan kekaryaan (Emil Salim, 1989). Dengan terutama memusatkan perhatian pada kaitan fungsionalnya dengan proses keterbentukannya secara umum, ada 3 karakteristik khas yang dapat digunakan untuk melukiskan manusia Indonesia masa depan yang dikehendaki: yaitu, kepekaan, kemandirian dan tanggung jawab. Tentu saja penjabaran, pengembangan serta penerapannya selalu berpijak pada landasan pandangan hidup bangsa, yaitu Pancasila. Kepekaan berarti kemampuan yang tajam -- dalam arti kemampuan berpikir maupun kemudahtersentuh hati nurani -- dalam melihat dan merasakan segala sesuatu, mulai dari kepentingan orang lain, termasuk mereka yang masih akan dilahirkan, sampai dengan kelestarian lingkungan yang merupakan gubahan Sang Maha Pencipta (Emil Salim, 1981). Kemandirian berarti kemampuan menilai hasil dan proses berpikir sendiri, di samping menilai hasil dan proses berpikir orang lain, serta keberanian bertindak sesuai dengan apa yang dianggap benar dan perlu. Sedangkan tanggung jawab berarti kesediaan untuk menerima segala konsekuensi keputusan serta tindakan sendiri.

²J. Naisbitt dan P. Aburdene, *Megatrends 2000* (New York: Avon Books, 1990), hal. 323.

Ketiga ciri-ciri operasional tersebut merupakan persyaratan penting yang harus dimiliki oleh setiap individu warga masyarakat, untuk mampu bertahan -- baik sebagai individu maupun bersama-sama dengan individu-individu lain sebagai masyarakat -- di dalam badai perubahan yang, di negara kita, secara serempak dibawa oleh revolusi industri dan revolusi informasi sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya. Oleh karenanya, ketiga sasaran operasional tersebut harus menjadi salah satu acuan penting dalam merancang serta melaksanakan program pendidikan nasional, yang tidak semata-mata merupakan penerusan nilai-nilai luhur warisan nenek moyang, melainkan penerjemahan nilai-nilai tersebut ke dalam latar masa kini dengan antisipasi masa depan secara bermakna bagi setiap peserta didik.

Dari sudut pandangan ini, upaya mencerdaskan kehidupan bangsa hanya mungkin membuahkan hasil yang dikehendaki, apabila pendidikan terhayati oleh peserta didik sebagai kesempatan untuk "... *answering questions, questioning answers, and questioning questions*" (Houston, dkk. 1988), karena sekolah seyogyanya merupakan prototipe dari apa yang oleh seorang penulis diisyaratkan sebagai *the literate community*, bukan sekadar dalam arti kemelekehurufan melainkan sebagai pembudayaan kemampuan bergaul secara tepat dengan wacana -- yang dapat ditampilkan melalui berbagai media yaitu cetak, elektronik maupun lisan -- sebagai representasi dunia luar dalam bentuk benda, gejala dan peristiwa maupun dunia dalam yang berwujud perasaan, pikiran serta gagasan (Wells, 1990).

Dengan demikian menunjukkan bahwa, sasaran ideal pembentukan upaya pencerdasan kehidupan bangsa adalah pembentukan insan-insan intelek paripurna (Emil Sa-

lim, 1989), yang mampu berpikir secara mandiri (lihat kembali Wells, 1990). Maka apabila disimpulkan, ciri utama dari manusia dan masyarakat masa depan yang dimaksudkan dapat dirumuskan sebagai: (a) manusia yang mendidik diri sendiri sepanjang hayat; dan (b) masyarakat belajar yang terbuka terhadap perubahan, namun memiliki pandangan hidup yang mantap sehingga tidak kehilangan jati-dirinya di dalam mengarungi badai perubahan yang semakin melaju.

Dengan perkataan lain, pendidikan merupakan upaya peningkatan mutu sumber daya manusia yang pada akhirnya akan berperan menentukan -- menjadi *cutting edge* -- di dalam pemanfaatan sumber daya alam demi peningkatan mutu kehidupan berdasarkan pemikiran-pemikiran yang berdasarkan wawasan masa depan. Sebaliknya, apabila sumber daya manusia kita tidak terkembangkan sebagaimana mestinya, maka kita akan terpaksa menggunakan acuan-acuan masa depan yang dikembangkan oleh pihak lain -- misalnya negara-negara maju dengan wawasan serta kepentingannya sendiri -- dalam menentukan arah pembangunan, sehingga secara tidak disadari kita menyerahkan kedaulatan untuk dijajah oleh pihak luar, dalam hal ini oleh kepentingan konglomerat antar-bangsa (Soedjatmoko, 1983; Emil Salim, 1989). Ini berarti bahwa penjabaran tujuan kemerdekaan maupun penyelenggaraan upaya-upaya perwujudannya harus sepenuhnya dilakukan oleh seluruh bangsa melalui pelembagaan mekanisme pengambilan keputusan partisipatif dan persetujuan atas dasar pemahaman (*informed consent*) yang dinamakan demokrasi. Tidak diragukan lagi bahwa baik penjajahan politik melalui kekuatan senjata maupun penjajahan ekonomi melalui kekuatan ilmu dan teknologi, pada dasarnya akan berdampak

sama fatalnya -- bangsa yang dijajah kehilangan dirinya sendiri.

Karakteristik Pendidikan yang Dikehendaki

Pada dasarnya pendidikan harus dilihat sebagai tujuan dan sekaligus proses -- pendidikan dilakukan untuk mencapai sesuatu, tetapi juga menunjuk pada proses yang terjadi sepanjang hayat. Sedangkan dari segi pelaksanaannya, keterwujudan tujuan sepenuhnya tergantung pada prosesnya "... *the medium is the message, the process is the content*" (Raka Joni, 1988). Hal ini penting ditekankan oleh karena, pendidikan bukan semata-mata berfungsi sebagai sarana sosialisasi, apalagi sekedar sebagai proses penerusan informasi yang terlepas-lepas dan hampa makna.

Sebaliknya, pendidikan adalah proses sepanjang hayat dari perwujudan pembentukan diri secara utuh dalam arti pengembangan segenap potensi dalam rangka pemenuhan semua komitmen manusia sebagai individu dan warga kelompok (keluarga, masyarakat, negara-bangsa, dan antar-bangsa) -- proses belajar yang tidak berkeputusan untuk menemukan diri sendiri, menjadi diri-sendiri, suatu proses "... *(to) learn to be*" (Faure, 1972).

Selain itu, pendidikan bukan hanya proses untuk menghasilkan sesuatu di luar diri pembelajar, baik dalam bentuk unjuk kerja maupun produk kasat mata (Marshall, 1988). Dan yang terwujud melalui kerja sama para individu warga masyarakat yang terdidik itu, secara tidak langsung pendidikan juga mengemban misi mengubah masyarakat, dalam arti peningkatan mutu kehidupan material dan spiritual, bukan sekedar untuk melestarikan keadaan.

Di pihak lain, secara operasional dalam bentuk pelaksanaannya yang paling buruk, pendidikan telah diciutkan menjadi tidak lebih dari upaya pemberian informasi yang penguasaannya ditagih melalui ujian yang terutama mempersyaratkan hafalan. Sementara kurikulum yang cenderung sarat kandungan bahan ajaran, dan penyempurnaan kurikulum nyaris selalu berarti penambahan bahan ajaran, termasuk yang bersumber dari titipan pelbagai kepentingan yang dikemas secara terlepas-lepas. Yaitu, mulai dari koperasi sampai dengan kelestarian lingkungan, yang merupakan perwujudan dari pandangan yang melihat pendidikan sebagai pemberian informasi.

Terlebih parah lagi, pendekatan dasar yang digunakan mengacu kepada aras (batas) kemampuan rata-rata siswa, terlepas dari kenyataan bahwa populasi kelompok layanan memiliki karakteristik sangat heterogin. Oleh karena itu tidaklah berlebihan apabila disimpulkan bahwa setelah 45 tahun merdeka, pendidikan dasar kita masih menggunakan pendekatan memilah dan memilih yang merupakan ciri khas pendidikan di zaman penjajahan yang bersifat sangat selektif. Untuk dapat menempatkannya secara kontekstual, sehingga lebih memudahkan untuk melihat bagian-bagian yang memerlukan penyesuaian, berikut ini dikemukakan pengamatan tentang perkembangan pendidikan.

Di waktu-waktu yang lampau, pendidikan dianggap sebagai upaya generasi tua untuk "memberi bekal" kepada generasi penerus, sehingga yang belakangan ini siap mengarungi samudera kehidupan. "Bekal" yang dimaksud digambarkan sebagai wawasan, pengetahuan serta ketrampilan, yang dapat digunakan untuk menunaikan tugas-tugas kehidupan di kemudian hari. Terdapat kesan statis yang terbersit dari wawasan

mengenai pendidikan sebagai pemberian bekal hidup ini: statis dalam perlengkapan yang dibekalkan dan/atau statis dalam permasalahan kehidupan yang dihadapi. Ungkapan arif masa lalu yang menyatakan bahwa adalah lebih bijaksana memberikan pancing kepada seseorang daripada memberikan ikan, mungkin tidak sepenuhnya relevan dengan asas belajar sepanjang hayat yang merupakan tuntutan mutlak abad informasi. Karena itu, ke dalam kubu pemikiran yang memandang pendidikan semata-mata sebagai sosialisasi inilah agaknya harus dimasukkan pandangan yang menganggap kedewasaan sebagai tujuan pendidikan, sehingga ia akan usai begitu taraf ini tercapai. Dengan titik berangkat yang berlainan, tetapi juga sampai pada muara yang sama, yaitu pemutusan kontinuitas gagasan pendidikan sepanjang hayat sebagaimana dinyatakan di muka, adalah pemisahan antara pendidikan anak yaitu pedagogi yang dianggap secara kualitatif berbeda dari pendidikan orang dewasa yang dinamakan andragogi (Copley, 1978).

Dalam konteks yang lebih luas, yang memang belum pernah sampai berkembang di negara kita, ada pula pandangan yang melihat pendidikan semata-mata sebagai penumbuhan kemampuan serta keberanian untuk meninggalkan segala sesuatu yang lama yang kesemuanya dianggap usang. Demikian ekstrim pendirian ini dibawakan di negara-negara Barat tertentu dalam dasawarsa 1960-an dan 1970-an, sehingga melahirkan apa yang dinamakan kebudayaan serba menyanggah (*counter culture*).

Ada 4 arah yang perlu ditempuh melalui pendidikan dalam mengupayakan bantuan kepada para siswa untuk menyongsong masa depan (Kauffman, Jr. 1976). *Pertama*, pendidikan harus benar-benar membentuk ke-

mampuan dan kemauan berpikir, dalam menganalisis dan memahami permasalahan masa depan secara rasional, bukan dalam bentuk rekaan seorang jenius, apalagi melalui *wangsit*; salah satu kemampuan khusus yang perlu dibentuk secara sistematis dalam hubungan ini adalah kemampuan berpikir epistemologis yang bukan hanya kritis terhadap pikiran orang lain, melainkan juga kritis terhadap pendapat diri sendiri -- mempertanyakan kesahihan pengetahuan yang diperoleh dengan menilai bukti-bukti (*evidence*) beserta proses pembuktian dan penarikan kesimpulan yang digunakan (White, 1987). Secara lebih lugas, bahkan ada yang menamakan kemampuan berpikir kritis ini sebagai "... *built-in, shock-proof crap detector*" (Postman dan Weingartner, 1969).

Di samping itu urunan potensial penting pendidikan melalui sistem persekolahan adalah pembentukan kemahirwacanaan (kemampuan *literate thinking*) yaitu kemampuan menilai proses dan hasil berpikir sendiri baik yang dilakukan melalui membaca maupun menulis, di samping kemampuan menilai proses dan hasil berpikir orang lain (lihat kembali Wells, 1990). Oleh karena itu, kemampuan ini merupakan perwujudan kemampuan berpikir mandiri, yang pada gilirannya merupakan salah satu sendi utama kemerdekaan serta merupakan persyaratan mutlak bagi berfungsinya masyarakat yang demokratis.

Kemungkinan urunan sistem persekolahan untuk meletakkan dasar bagi perubahan-perubahan berdampak jangka panjang semacam inilah, yang seyogyanya tidak boleh didesak ke luar kawasan misi layanan ahli kependidikan (Cole, 1990) oleh kesibukan mengurus ketercapaian bentuk-bentuk hasil jangka pendek, dalam bentuk perubahan tingkah laku yang dapat diamati sebagai-

mana dipelopori oleh Robert Mager (Mager, 1975) pada akhir setiap pertemuan tatap muka, yang antara lain digalakkan melalui pendekatan Pengembangan Program Sistem Instruksional (PPSI) Kurikulum 1975 atau sebagai peningkatan daya serap yang dicerminkan dalam bentuk skor-skor berbagai ujian.

Kedua, karena sebagian cukup besar permasalahan masa depan bersumber pada keterkaitan rumit antara lingkungan alamiah dan lingkungan buatan kita, maka pendidikan sejak dini perlu menjadikan sadar lingkungan yang berlandaskan pemahaman terhadap kaitan sistemik sebagai salah satu acuan dasarnya. Pada gilirannya, kesadaran terhadap lingkungan merupakan landasan untuk terbentuknya etika lingkungan. Mengejar ketinggalan dalam bidang ilmu dan teknologi hendaknya diartikan sebagai upaya sistematis dalam pemupukan kemampuan menciptakan serta mengendalikan teknologi dengan acuan peningkatan harkat manusia, bukannya semata-mata sebagai perlombaan memanfaatkan kemudahan serta kenikmatan teknologi yang dapat berdampak membius serta membelenggu.

Ketiga, meskipun kita tidak akan pernah mampu meramalkan masa depan, pendidikan dapat membantu siswa dalam memahami permasalahan serta kecenderungan masa depan, bukan hanya yang bersumber dari wawasan negara maju melainkan juga yang benar-benar bertolak dari perspektif global dalam memperkirakan kemungkinan-kemungkinan arah masa depan serta dampak pelbagai tindakan, keputusan dan kebijaksanaan yang dilakukan sekarang (Naisbitt, 1982; Naisbitt dan Aburdene, 1990; Soedjatmoko, 1983); di negara kita, perspektif tersebut dipertegas sebagai acuan pembangunan berwawasan lingkungan (Emil Salim, 1986).

Dan *keempat*, karena perubahan merupakan ciri yang pasti di dalam kehidupan ini, yang makin lama terjadi dengan tingkat kelajuan yang makin tinggi, maka pendidikan harus membantu para siswa memahami perubahan serta mengatasi permasalahan-permasalahan yang ditimbulkannya. Dengan perkataan lain, pendidikan harus memberikan urunan membentuk kemampuan yang dipersyaratkan abad informasi -- menemukan informasi, dan memanfaatkannya untuk menata urutan pilihan serta mengambil keputusan di dalam perjalanan hidup masing-masing individu (White, 1987), atau secara lebih singkat, kemampuan mengelola informasi (Parapak, 1990).

Dalam hubungan ini relevan pula digarisbawahi pandangan hidup Pancasila, yang melihat proses serta tujuan pendidikan dalam keseimbangan yang selaras antara pernyataan dan pemenuhan kebutuhan individu dengan keperluan mengembangkan kehidupan bermasyarakat. Dengan perkataan lain, pendidikan dilihat sebagai proses pemanusiaan yang terjadi dalam konteks kehidupan bermasyarakat adalah sebagai transaksi sosial-budaya dan bukan sekedar sebagai preskripsi teknologi.

Selanjutnya, proses pemanusiaan dalam transaksi sosial-budaya tersebut hanya mungkin terwujud sebagaimana mestinya, apabila interaksi pendidikan dilandasi oleh sikap saling menghargai harkat masing-masing antara pendidik dan peserta didik, serta secara seimbang terwujud sebagai kesempatan mempertanyakan dan kesediaan menerima nilai-nilai lingkungan. Agaknya tidak perlu ditandaskan lebih jauh bahwa sikap saling menghargai ini dapat dan perlu diperluas penerapannya, yaitu dalam melihat pelbagai permasalahan dengan landasan solidaritas sosial yang bahkan dapat, dan perlu, diperluas sampai dengan cakupan hu-

bugan antar bangsa.

Bertolak dari pandangan yang mengupayakan keseimbangan antara kedaulatan peserta didik dengan kewibawaan pendidik, serta penumbuhan secara serasi kemampuan mempertanyakan dengan kesediaan menerima nilai-nilai lingkungan (Postman, 1979), maka peranan kunci dari pendidik di dalam interaksi pendidikan adalah pengendalian, yang pada dasarnya dilakukan melalui 3 cara. Yaitu: (a) menumbuhkan kemandirian dengan menyediakan kesempatan untuk mengambil keputusan dan bertindak; (b) menumbuhkan kemampuan mengambil keputusan dan bertindak, dengan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan peserta didik; dan (c) menyediakan sistem dukungan yang memberi kemudahan belajar, sehingga menawarkan peluang optimal kepada siswa untuk berlatih mengambil keputusan dan bertindak.

Akhirnya, makna pengendalian ini perlu diartikan secara khas kependidikan -- sejak awal tujuannya adalah pemandirian peserta didik. Di dada setiap pendidik harus secara kokoh terpateri keyakinan bahwa segala kelebihan yang dimilikinya adalah bersifat kebetulan dan sementara, bukan hakiki. Setahap demi setahap, tetapi pasti dan sistematis, seorang pendidik harus mengangsurkan prakarsa dan tanggung jawab belajar kepada peserta didik. Seorang pendidik sejati menyadari sepenuhnya bahwa otoritas profesional yang diberikan kepadanya hanya mempunyai satu tujuan, yaitu untuk memandirikan peserta didik, bukan untuk menjinakkannya (Ditjen Dikti, 1989a; Marshall, 1988). Dengan perkataan lain, ia harus sewaktu-waktu siap menarik diri, begitu petunjuk-petunjuk kemandirian peserta didik mulai tumbuh.

Dengan demikian, secara psikologis pengendalian kependidikan ini bertumpu pada penyerasian antara dorongan untuk memperoleh rasa aman dengan dorongan untuk bertumbuh melalui penajakan hal-hal baru (Silberman, Allender dan Yanoff, 1972), yang dapat menumbuhkan keagairahan di samping kemampuan belajar. Untuk siswa-siswa yang lebih muda peranan pendidik memang bisa dan perlu lebih bersifat "supervisory and executive", sedangkan untuk peserta didik yang lebih matang pengendalian bersama (*shared control*) yang bertujuan memacu pemandirian subyek didik seyogyanya lebih menggejala (lihat kembali Marshall, 1988). Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional, menuangkan asas pengendalian kependidikan yang khas ini di dalam ajarannya yang terkenal "...ing ngarsa sung tulala, ing madya mangun karsa, tutuwuri handayani, waspada purba wasisa..."

Pemikiran-pemikiran mendasar mengenai pendidikan, yang secara sangat garis besar dikemukakan di atas, sangat jelas mengisyaratkan kepada kita bahwa penyelenggaraan pengajaran yang mendidik itu merupakan layanan ahli, layanan profesional. Ini berarti bahwa pelaksanaannya mempersyaratkan bukan hanya penguasaan mantap terhadap bahan ajaran, melainkan juga proses penyajiannya pun meyakinkan penyampaian pesan satuan pelajaran yang sedang diajarkan maupun pemberian urunan nyata bagi pencapaian tujuan utuh pendidikan sesuai dengan wawasan kependidikan.

Maka, di samping memerlukan pengambilan serentetan keputusan situasional dalam perancangannya, juga pengelolaan kegiatan belajar-mengajar yang mendidik menuntut kesiagaan serta kemampuan untuk mengambil keputusan-keputusan transaksional, se-

hingga setiap episode belajar-mengajar selalu mengacu pada pencapaian kedua tujuan tersebut di atas (Raka Joni, 1983). Oleh karena itu, pengelolaan kegiatan belajar-mengajar terdiri dari serentetan siklus pengambilan keputusan serta pemantauan dampaknya, yang selalu dilakukan dengan berlandaskan pertimbangan yang eksplisit mengenai kemengapaannya -- reflektivitas merupakan salah satu ciri khas keprofesionalan layanan (Ditjen Dikti, 1989a; Raka Joni, 1989a). Pada gilirannya, reflektivitas hanya mungkin terjadi apabila layanan ahli yang dimaksud bertumpu pada landasan intelektual yang mantap -- "... a codified or codifiable aggregation of knowledge, skills, understanding, and technology, of ethics and disposition, of collective responsibility..." yang perlu dan dapat secara sengaja dan sistematis dipelajari dan divalidasi (Shulman, 1987).

Implikasi Bagi Pengembangan Kurikulum

Untuk dapat secara mendasar memperbaiki kurikulum sekolah dasar sehingga benar-benar memberikan urunan dalam mengantisipasi masa depan, perlu disimak acuan-acuan operasional sebagai berikut.

Jenjang Pemikiran Tentang Kurikulum

Kesimpangsiuran harapan yang ditumpukan pada pendidikan yang kemudian berdampak pengebirian pesan itu terjadi antara lain akibat kekurangajekan jenjang pemikiran tentang kurikulum yang diacu ketika dilakukan perbincangan serta penyempurnaan kurikulum.

Jenjang pemikiran tentang kurikulum yang dapat digunakan dalam membahas kurikulum yaitu jenjang ideal, formal, instruksional, operasional dan eksperiensial. Jenjang ideal menunjuk kepada kurikulum sebagaimana diinginkan oleh semua pihak yang merasa berkepentingan dengan pendidikan melalui sistem persekolahan -- pejabat pemerintah, pemuka masyarakat, pimpinan berbagai lembaga pemberi kerja, orang tua dan masyarakat luas pada umumnya. Jenjang formal adalah kurikulum sebagaimana ditetapkan secara resmi oleh badan yang berkewenangan, sementara jenjang instruksional merupakan program kegiatan belajar-mengajar sebagaimana dirancang oleh guru sebagai pelaksana teknis di lapangan. Sedangkan jenjang operasional adalah perwujudan kurikulum sebagaimana terlihat oleh pengamat terlatih misalnya sebagaimana direkam para peneliti. Dan akhirnya yang paling menentukan karena membuahkan dampak dalam bentuk hasil belajar adalah jenjang eksperiensial sebagaimana dihayati oleh para siswa.

Pengebirian atau bahkan penyelewengan pesan dapat terjadi di dalam penerjemahan kurikulum jenjang yang satu ke jenjang yang di bawahnya, sehingga yang tertangkap oleh siswa pada jenjang eksperiensial dapat samasekali berlawanan dengan niat yang telah ditetapkan pada jenjang-jenjang di atasnya. Maka terjadilah gejala yang dinamakan "kurikulum tersamar" (*hidden curriculum*), yang justru lebih berpengaruh daripada kurikulum yang telah dikukuhkan secara formal.

Mata pelajaran yang berangkat dengan misi pembentukan afektif di tingkat ideal dan formal, tetapi akhirnya terhayati sebagai pemberian dan perolehan informasi yang hampa makna oleh para siswa sehingga

pesan utama yang menjadi sasaran justru luput, merupakan salah satu contoh pengebirian pesan kependidikan tersebut. Sementara pendirian yang memaafkan keadaan ini menyatakan bahwa untuk pembentukan sikap dan nilai dipersyaratkan pengetahuan, pada akhirnya dapat berdampak fatal, sebab salah-salah sikap yang terbentuk sebagai buah penghayatan justru yang berlawanan dengan sikap yang sejak awal dikehendaki.

The Process is the Content, the Medium is the Message

Dapat disimpulkan bahwa bentuk kegiatan belajar-mengajar sebagaimana yang terhayati oleh para pebelajarlah yang pada akhirnya menampilkan pesan kependidikan. Kenyataan ini digambarkan dengan pemeo terkenal empu bidang media, Marshall McLuhan yang berbunyi "... *the medium is the message* ..." yang banyak dikutip di mana-mana. Untuk bidang pendidikan, pemeo ini dapat diparafrasekan menjadi "... *the process is the content* ..." yang menggarisbawahi pentingnya peranan kurikulum jenjang eksperiensial di dalam penyampaian pesan kependidikan.

Oleh karena itu, diperlukan pemikiran kembali mengenai sasaran utuh pembentukan pendidikan secara lebih cermat yang kemudian secara sistematis dikaitkan dengan proses keterbentukannya, sehingga dapat dicegah terjadinya peluang pengebirian dan penyelewengan pesan sebagai akibat bentuk kegiatan belajar-mengajar yang tidak sesuai dengan hakikat pesan kependidikan yang ingin disampaikan. Dengan memanfaatkan, akan tetapi tidak sepenuhnya mengikuti, taksonomi pencapaian pendidikan yang diharapkan terjadi melalui sistem persekolah-

an yang dikemukakan oleh Bloom dan kawan-kawannya sekitar 4 dekade yang lalu (Bloom dkk., 1956; Krathwohl dkk., 1964). Salah satu cara memetakan sasaran pembentukan pendidikan yang mengaitkan ranah sasaran dengan proses keterbentukannya adalah dengan memilahkannya menjadi pengetahuan-pemahaman, ketrampilan (kognitif dan personal-sosial di samping psikomotorik) serta sikap-sikap (Raka Joni, 1983).

Pembentukan pengetahuan-pengetahuan merupakan sendi utama gejala belajar. Dari segi kognitif proses belajar dilihat bukan sebagai perolehan informasi yang berlangsung secara satu arah dari luar ke dalam diri siswa, melainkan sebagai pemberian makna oleh pebelajar kepada pengalamannya melalui proses asimilasi dan akomodasi yang bermuara pada pemutakhiran struktur kognitifnya (Ausubel dkk., 1978), sehingga lebih merupakan proses "... *constructing and restructuring of knowledge and skills (schemata) within the individual in complex network of increasing conceptual consistency* ...," ketimbang proses perolehan fakta serta pembentukan keterampilan yang terlepas-lepas yang terwujud melalui pengaturan pemberian ganjaran dari luar.³

Selanjutnya, pemberian makna terhadap pengalaman tersebut pada umumnya tidak dilakukan secara sendiri-sendiri oleh pebelajar sebagai perorangan, melainkan melalui interaksi rumit dalam jaringan sosial yang unik yang terbentuk di dalam budaya kelas (*classroom culture*) di sekolah (Collins dan Green, 1990). Oleh karena itu, pengelolaan proses belajar-mengajar pertama-tama harus berarti pengelolaan pemrosesan gagasan

³H.H. Marshall, "Work or Learning: Implications for Classroom Metaphor," *Educational Researcher* 17 (December 1988), hal. 13.

an di dalam interaksi belajar-mengajar, dan bukan semata-mata pengelolaan siswa dan lingkungan belajarnya (Shulman, 1987; Conny Semiawan dkk., 1985). Dengan perkataan lain, perhatian utama harus ditujukan pada pemrosesan gagasan (*inner process*) tersebut yang dilakukan oleh pebelajar sendiri, yang mengantarai (*mediate*) terjadinya gejala belajar (Peterson, 1988; Wittrock, 1986) yang bermuara pada pengembangan diri -- suatu ciri khas latar pendidikan, dan bukan kepada unjuk kerja atau prestasi belajar yang kemudian dikaitkan dengan sistem penghargaan dari luar (*external reward*) seperti indeks prestasi, yudisium, ijazah dan yang sebangsanya -- yang lebih merupakan ciri latar kerja (Marshall, 1988; 1990). Pelibatan mental siswa secara optimal di dalam proses belajar inilah dikenal sebagai pendekatan Cara Belajar Siswa Aktif, yang pengembangannya telah dirintis sejak tahun 1978 namun belum sepenuhnya mantap, baik acuan konseptual maupun penerapannya (Raka Joni, in press).

Dari segi pembentukan keterampilan (intelektual, personal-sosial, di samping psikomotorik) proses belajar harus merupakan kesempatan melakukan langsung berbagai kegiatan yang menuntut penggunaan berbagai keterampilan tersebut (*direct performance*), termasuk kesempatan untuk memperoleh serta mencerna balikan-balikannya yang merupakan bagian tak terpisahkan dari proses berlatih. Meskipun pemahaman (dalam bentuk peta kognitif maupun rasional kegiatan) memang diperlukan terlebih-lebih untuk keterampilan-keterampilan yang bersifat lebih rumit, tetapi kesempatan untuk melakukan perbuatan langsung termasuk perolehan dan pencernaan balikannya, dengan atau tanpa bantuan guru atau sejawat, merupakan persyaratan mutlak dari pembentukan keterampilan, baik keterampilan

psikomotorik maupun keterampilan intelektual dan personal-sosial.

Sedangkan bagi pembentukan sikap dan nilai, persyaratan yang diperlukan adalah penghayatan berbagai peristiwa dan kegiatan yang sarat-nilai. Baik secara pasif menyaksikan serta mendiskusikan berbagai peristiwa dan kejadian sarat-nilai maupun secara aktif berbentuk keterlibatan langsung dalam berbagai kegiatan sarat-nilai -- memperlakukan dan diperlakukan orang lain secara santun dan demokratis, atau mengumpulkan sumbangan bagi korban bencana alam, dan sebagainya. Dengan perkataan lain, sikap dan nilai terbentuk sebagai dampak akumulasi penghayatan terhadap pengalaman, bukan hasil pengajaran yang eksplisit terpisah-pisah. Terlebih-lebih lagi, pembentukan sikap dan nilai juga memerlukan penguatan di lingkungan keluarga dan masyarakat, sehingga diperlukan kesejajaran di antara 3 pusat pendidikan: sekolah, keluarga dan masyarakat.

Dalam proses interaksi belajar-mengajar akan terjadi pula peluang-peluang untuk menyampaikan atau menekankan kembali, secara langsung atau tidak langsung, pesan-pesan kependidikan penting lainnya dalam rangka pencapaian tujuan utuh pendidikan. Yaitu, mulai dari kebiasaan bekerja secara cermat dan tepat waktu sampai dengan rasa kebanggaan bernegara bangsa Indonesia. Terwujudnya sasaran pendidikan yang diantarai oleh tindakan langsung guru dinamakan dampak pengajaran (*instructional effects*), sementara yang merupakan buah dari akumulasi pengalaman dan penghayatan dinamakan dampak pengiring (*nurturant effects*, Joyce dan Weil 1980).

Pandangan yang melihat pelaksanaan setiap kegiatan belajar-mengajar, setiap ke-

putusan dan tindakan seorang guru dalam mengelola kegiatan belajar-mengajar itu sebagai bagian tidak terpisahkan dari upaya pencapaian tujuan utuh pendidikan dinamakan "Wawasan Kependidikan", yang dasarnya secara mantap sudah harus diletakkan dalam pendidikan pra-jabatan profesional tenaga kependidikan (Raka Joni, 1983).

Perampingan Isi, Pemekaran Misi

Kecenderungan untuk terus-menerus menambah muatan kurikulum bersumber dari pandangan bahwa pesan-pesan kependidikan harus (selalu) disampaikan sebagai informasi. Pandangan ini agaknya menjadi lebih mapan dengan digunakannya pendekatan Program Pengembangan Sistem Instruksional (PPSI) dalam penerapan Kurikulum 1975, yang antara lain sangat mementingkan tes awal dan akhir pelajaran dengan mengabaikan proses pengajaran yang seolah-olah dibiarkan menjadi "kotak hitam" dalam acuan analisis sistem. Keadaan ini dibuat lebih parah dengan dianutnya pada waktu yang sama pendekatan tujuan *behavioral* yang diperkenalkan oleh Robert Mager (lihat kembali Mager, 1975) sehingga sistem tagihan pengajaran sangat berat mengacu kepada tujuan-tujuan yang berkisar pada kemampuan yang dilukiskan dengan rasa "... siswa dapat menyebutkan ..."

Dengan peningkatan kepedulian terhadap keragaman wujud kegiatan belajar-mengajar sesuai dengan hakikat pesan yang ingin disampaikan (Cartledge dan Milburn, 1986; Jones dkk., 1987; Joyce dan Weil, 1980; Raka Joni dan van Unen, 1980) maka terbukalah peluang untuk merampingkan muatan kurikulum, tetapi dibarengi dengan pemekaran peranannya di dalam menyam-

paikan pesan-pesan kependidikan. Yaitu, terlebih-lebih untuk aspek-aspek yang terwujud sebagai dampak pengiring baik dari ranah keterampilan maupun sikap dan nilai. Kemahirwacanaan misalnya, untuk mengambil satu contoh dari ranah keterampilan, mestinya terbentuk sebagai urusan bersama semua mata pelajaran, bukan hanya merupakan tanggung jawab mata pelajaran bahasa Indonesia saja. Sementara itu hampir semua sasaran pembentukan ranah sikap dan nilai mulai dari penghayatan akan kebesaran Sang Maha Pencipta, kecintaan kepada tanah air dan kebanggaan berbangsa, kesadaran lingkungan, kesediaan menghargai orang lain sampai dengan kebiasaan untuk bekerja dengan tertib dan tepat waktu justru lebih banyak terbentuk sebagai dampak pengiring, bukan sebagai sesuatu yang secara eksplisit diajarkan apalagi kalau hanya disampaikan dalam bentuk informasi. Sejalan dengan pemikiran ini, mudah-mudahan gagasan untuk mencantumkan mata pelajaran budi pekerti secara berdiri sendiri dalam kurikulum yang akan datang tidak jadi diwujudkan!

Oleh karena itu, mengupayakan pembentukan sasaran-sasaran pendidikan yang berdasarkan hakikatnya terwujud sebagai dampak pengiring, melalui mata pelajaran tersendiri -- apalagi yang sistem penyampaian serta tagihannya menekankan perolehan dan hafalan informasi -- sebenarnya sama saja dengan memberi peluang bagi terwujudnya kurikulum tersamar dengan dampak yang dapat sangat bertentangan dengan niat yang menjadi asal-muasalnya. Bahkan kecenderungan untuk menekankan hanya salah satu aspek sasaran pembentukan yang sebenarnya tepat pun masih perlu dikoreksi, seperti pemusatan perhatian berlebihan pada keterampilan melakukan penelitian yang agaknya merupakan ciri utama pendekatan kete-

rampilan proses (Conny Semiawan, dkk., 1985). Sosok manusia utuh Indonesia masa depan yang dikehendaki itu terlalu rumit untuk diwujudkan hanya dengan melalui salah satu pendekatan!

Akhirnya dengan menjadi semakin rampingnya muatan kurikulum, maka lebih terbuka ruang untuk memasukkan muatan yang selama ini terbungkalai, antara lain pengalaman belajar yang berkaitan dengan pengenalan serta penghargaan terhadap aspek-aspek budaya daerah yang perlu dipelihara serta dikembangkan sebagai bagian dari kebudayaan nasional Indonesia modern. Usaha-usaha informal yang akhir-akhir ini dilakukan, khususnya yang hanya menonjolkan aspek-aspek upacara yang lebih mengisyaratkan nilai-nilai feodal agaknya perlu dikaji secara lebih cermat urunannya bagi pembentukan budaya Indonesia masa depan yang dicita-citakan, meskipun daya tarik serta keterjualannya memang tinggi dari segi kepariwisataan. Dengan pembinaan sistematis yang didasarkan pada kebijakan kebudayaan yang jelas, pendidikan melalui sistem persekolahan dapat diharapkan memberikan urunan penting dalam menangkal terjadinya keterasingan budaya (*cultural alienation*) yang dialami oleh semakin banyak generasi baru karena ditelan oleh latar perkotaan yang semakin merebak, yang ditandai oleh pembauran yang cenderung lebih menonjolkan keberbedaan (*diversity*) serta kesendirian (*privacy*) yang tidak sesuai dengan jiwa "Bhinneka Tunggal Ika".

Sistem Tagihan

Perwujudan upaya pendidikan, sangat banyak tergantung pada sistem tagihannya.

Apabila penilaian terutama ditujukan pada kemampuan menghafal semakin banyak informasi, maka pelaksanaan pengajaran akan ditandai oleh kecenderungan untuk "mendahulukan apa yang dianggap penting itu".

Bertolak dari karakteristik sosok manusia utuh masa depan yang dicita-citakan, ada 2 terobosan yang diperlukan untuk keluar dari kungkungan Magerisme sebagaimana dikemukakan di atas. Pertama, penilaian juga terlebih-lebih harus ditujukan pada aspek-aspek yang mencerminkan karakteristik manusia utuh yang selama ini diabaikan, seperti kemampuan berpikir kritis dan imajinatif dalam menemukan dan memecahkan masalah, ketimbang pada kemampuan menghafal sebanyak mungkin potongan-potongan informasi yang hampa makna, untuk mengemukakan salah satu contoh. Dan kedua, pembentukan kemahirwacanaan yang merupakan urunan sangat potensial pendidikan melalui sistem persekolahan harus merupakan tanggung jawab semua guru sesuai dengan Wawasan Kependidikan, dan bukan hanya merupakan urusan mata pelajaran bahasa Indonesia.

Dengan diterapkannya sistem guru kelas di sekolah dasar, maka secara struktural bagi kedua terobosan ini sebenarnya telah tersedia wadah, meskipun untuk penerapannya masih diperlukan lebih banyak upaya dan fasilitas.

Langkah-langkah Pengembangan Kurikulum dengan Pendekatan Sistematis-Sistemik

Kegiatan penyempurnaan kurikulum apalagi yang diharapkan akan membawa perubahan cukup mendasar, seperti penem-

patan sekolah dasar sebagai bagian pendidikan dasar 9 tahun sebagaimana diatur dalam USPN 1989, memerlukan anca-ancang yang memadai (Ditjen Dikti, 1989b). Kekurang-sabaran untuk dapat dengan segera "menambahkan dan mengurangi mata pelajaran" akan menghasilkan kurikulum yang tambal-sulam dengan sistem penyampaian yang "itu-itu juga".

Sebaliknya, dengan pendekatan sistematis-sistemik, diperlukan skenario kerja yang kurang-lebih mengikuti langkah-langkah sebagai berikut.

Pertama, diperlukan pematapan pemerial masyarakat dan manusia Indonesia masa depan yang dikehendaki dengan memanfaatkan masukan dari berbagai pihak terkait sebagai kerangka acuan dasar yang lebih jelas mengenai arah pendidikan yang perlu dikembangkan dan diselenggarakan.

Kedua, penerjemahan karakteristik manusia dan masyarakat masa depan Indonesia beserta karakteristik pendidikan yang diharapkan untuk mewujudkannya itu ke dalam asumsi-asumsi landasan program (*programmatic assumptions*) yang bertumpu pada hasil kajian empirik dan pendapat ahli di samping pada pilihan nilai masyarakat dan pemerintah. Langkah ke-2 ini menghasilkan artikulasi hakikat pendidikan, pebelajar, pendidik serta interaksi belajar-mengajar yang mendidik yang berperan sebagai acuan konseptual lebih rinci mengenai harapan-harapan yang ditumpukan pada pendidikan melalui sistem persekolahan maupun persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi bagi terselenggarakannya program pengajaran yang mendidik. Di samping itu, perangkat asumsi landasan program itu juga berfungsi untuk menangkal terjadinya pemborosan dan penyelewengan pesan kependidikan baik yang terjadi karena "penawaran-pena-

waran pragmatis" akibat kendala praktis maupun apabila terjadi kesengajaan karena alasan ideologis.

Ketiga, perumusan karakteristik lulusan yang dikehendaki yang mencerminkan sosok manusia utuh Indonesia dengan tekanan pada aspek-aspek yang pembentukannya menjadi tanggung jawab pendidikan di sekolah dasar. Dengan rumusan perangkat karakteristik lulusan, dapat dicegah kesimpangsiuran tagihan (kesiappakaian, menciptakan lapangan kerja dan sebagainya) sehingga mengurangi pembuang-buangan waktu untuk mengurus permasalahan yang sebenarnya menyebel (menyimpang) dari sasaran pendidikan yang disepakati.

Keempat, berdasarkan sasaran pembentukan yang dirumuskan dalam langkah ketiga, dapat diidentifikasi berbagai pengalaman belajar yang diperlukan untuk membentuk karakteristik-karakteristik yang dimaksud -- baik sebagai dampak langsung maupun sebagai dampak pengiring -- yang secara eksplisit menyoroti kaitan antara tujuan, bentuk dan isi masing-masing kegiatan sehingga lebih diyakinkan kesetiaan penerjemahan jenjang-jenjang kurikulum. Bentuk kegiatan dapat berupa berbagai modus pengkajian, berlatih dan kesempatan menghayati. Sedangkan isinya berupa pokok-pokok bahasan yang diangkat dari bidang-bidang kajian yang tercantum dalam USPN 1989. Kemungkinan pemasukan muatan lokal secara eksplisit dikaji pada tahap ini.

Kelima, perangkat pengalaman belajar yang diperkirakan merupakan persyaratan bagi terbentuknya sosok karakteristik lulusan yang dikehendaki yang berhasil diinventarisasikan dalam langkah 4 ditata dan dikelompok-kelompokkan menjadi mata pelajaran, dengan mempertimbangkan urutan

maupun kaitan isi serta *managability*-nya dari segi penyajian. Tumpang-tindih berlebihan antar mata pelajaran tertentu yang terdapat di dalam kurikulum yang berlaku di semua jenjang pendidikan dewasa ini dapat dirapikan pada tahap ini.

Keenam, penetapan skenario penyelenggaraan masing-masing mata pelajaran ke dalam bentuk silabus. Pada tahap ini, dengan menggunakan kaitan tujuan-bentuk-isi kegiatan yang ditetapkan pada langkah ke-4 sebagai panduan dari perangkat asumsi landasan program yang telah disepakati pada langkah ke-2 sebagai batu ujian, "kotak hitam" proses penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar yang dalam pendekatan PPSI memberi kesan dibiarkan tertutup sehingga sistem penyampaian didominasi oleh pemberian informasi, secara sistematis "dibuka" untuk meyakinkan agar kurikulum jenjang eksperiensial benar-benar setia kepada misi dan tujuan pendidikan. Dengan perkataan lain, peluang menjadi lebih besar untuk tersajikannya ragam bentuk kegiatan belajar-mengajar yang kaya sesuai dengan tuntutan hakikat pesan kependidikan yang ingin disampaikan.

Dan *ketujuh*, untuk "mempersenjata" jajaran garis depan pendidikan dalam menerapkan kurikulum formal demi mewujudkan kegiatan belajar-mengajar yang mendidik, perlu dilakukan pengembangan berbagai perangkat lunak pendidikan dengan memanfaatkan berbagai media yang semakin kaya tersedia. Tahap ini dapat, dan perlu, dideregulasikan -- sudah barang tentu dengan mekanisme kendali mutu yang wajar -- sehingga para pengarang dan penerbit dapat berlomba-lomba ambil bagian baik untuk memperkaya khasanah perangkat lunak pendidikan yang menunjang pembentukan kemampuan menggunakan banyak sumber sebagai salah satu aspek penting kemahirwa-

canaan maupun memperluas lapangan kerja. Perlu dicatat bahwa dengan deregulasi ini, juga dapat dicegah praktek-praktek cetak rompak dan, yang tidak kalah jahatnya, praktek mewajibkan penggunaan perangkat lunak tertentu (di waktu yang lampau biasanya berbentuk buku) oleh berbagai jenjang pejabat sehingga menghasilkan monopoli dan penulis-penulis gadungan di satu pihak, dan sebaliknya, mematikan kreativitas penulis-penulis yang potensial.

Tulisan ini tidak menjanjikan kata akhir tentang bagaimana seharusnya sosok kurikulum sekolah dasar yang akan datang, sehingga uraian mengenai langkah-langkah pengembangan kurikulum sebagaimana dikemukakan dalam bagian ini tidak akan dirinci lebih jauh. Penerapannya, dengan memperhatikan pokok-pokok pikiran yang dikemukakan dalam tulisan ini, dapat dimantapkan lebih jauh sementara kita berkiprah menyempurnakan kurikulum sekolah dasar sesuai amanat USPN 1989.

Penutup

Salah satu ciri penting abad informasi adalah globalisasi dengan individualisasi, yaitu saling taut terkaitnya peristiwa dan kejadian dalam segenap aspek kehidupan di satu tempat dengan tempat lainnya di muka bumi ini di satu pihak, serta semakin berperannya individu-individu mulai dari para negarawan sampai dengan *the men in the street* dalam mempengaruhi arah serta perwujudan perubahan tersebut di pihak lain. Kesemuanya adalah akibat kemajuan teknologi telekomunikasi dan komputer. Oleh karena itu, gejala ini menyarankan sangat pentingnya peranan pendidikan dalam membentuk manusia masa depan sekarang, yaitu manusia yang berpartisipasi penuh sebagai individu

warga masyarakat yang peka, mandiri dan bertanggung jawab bagi kemaslahatan dirinya maupun masyarakat -- dalam arti sempit maupun mendunia. Pada gilirannya, untuk perbaikan mutu pendidikan, kita perlu melakukan pengkajian-pengkajian mendasar baik mengenai manusia dan masyarakat masa depan yang dikehendaki maupun keadaan teramat heterogin yang berlaku di seluruh tanah air untuk memungkinkan kita menetapkan arah serta spesifikasi pendidikan yang diperlukan untuk mewujudkan manusia dan masyarakat masa depan Indonesia. Dengan perkataan lain, diperlukan artikulasi acuan konseptual di samping peningkatan sarana-prasarana serta pengelolaannya.

Terlepas dari kelemahan-kelemahan yang pernah dan barangkali akan masih tetap ada, agaknya sistem persekolahan tetap menjanjikan peluang unik bagi penyelenggaraan pendidikan yang dibutuhkan umat manusia yang hidup dalam masyarakat dengan jumlah anggota besar dan yang terspesialisasi secara rumit peranannya. Alasan efisiensi dari upaya massal ini ditambah dengan alasan psiko-pedagogis yang menyatakan bahwa aspek-aspek kemampuan tertentu seperti kemahirwacanaan yang merupakan tuntutan mutlak kehidupan abad informasi hanya akan terbentuk dengan baik di dalam latar sosial, menyebabkan sistem persekolahan sulit dicari gantinya. Oleh karena itu yang penting dilakukan adalah meningkatkan mutunya sehingga program pengajaran benar-benar dapat terwujud sebagai pendidikan.

Sementara dari segi konseptual, amanat USPNI 1989 yang menetapkan sekolah dasar sebagai bagian pendidikan dasar 9 tahun mengisyaratkan pentingnya pemikiran mendasar mengenai karakteristik lulusan yang dikehendaki, agar kita dapat bertahan serta berjaya sebagai negara bangsa di dalam

badai abad informasi. Pada gilirannya, karakteristik lulusan yang dikehendaki hanya dapat ditetapkan apabila telah disepakati misi pendidikan melalui sistem persekolahan pada umumnya, sekolah dasar pada khususnya. Baik berdasarkan hasil-hasil kajian empirik serta pendapat ahli maupun bertolak dari pilihan nilai masyarakat dan pemerintah. Sehingga dapat dicegah kesimpangsiuran harapan yang hanya berdampak menghambat penunaian misi sebenarnya dari pendidikan melalui sistem persekolahan. Ini berarti bahwa program pendidikan harus dikembangkan dengan pendekatan sistematis-sistemik -- program pengajaran disusun berdasarkan karakteristik lulusan yang mengacu pada gambaran manusia dan masyarakat Indonesia masa depan yang dikehendaki.

Kekurangsetiaan wujud pengalaman belajar yang dihayati pebelajar kepada tujuan utuh pendidikan dapat ditelusuri pada kerancuan jenjang pemikiran tentang kurikulum -- ideal, formal, instruksional, operasional dan eksperiensial. Sementara pendidikan -- secara de facto -- telah diciutkan menjadi pemberian informasi hampa makna dengan sistem tagihan yang sangat berat mengacu pada kemampuan menghafal. Pembaruan kurikulum nyaris selalu berarti penambahan mata pelajaran yang mengandung lebih banyak informasi, sedangkan kegiatan belajar-mengajar terwujud sebagai semakin lamanya para siswa harus dikungkung di ruangan kelas untuk duduk, mendengar dan mencatat informasi yang kemudian harus ditunjukkan perolehannya melalui kemampuan menghafal. Akibatnya, pengupayaan pencapaian tujuan utuh pendidikan praktis telah terbengkelai.

Akhirnya, untuk menerapkan kurikulum formal menjadi pengalaman belajar yang dihayati sebagai pendidikan oleh pebelajar,

pendidikan melalui sistem persekolahan tidak akan dapat diselenggarakan dengan mutu yang terjaga, apabila pelaksanaannya hanya dilakukan oleh para guru. Sebagaimana halnya layanan ahli di bidang kesehatan, dokter umum, perlu dibantu oleh berbagai spesialis, seperti ahli farmasi, perawat dan tenaga paramedis lainnya, maka layanan ahli kependidikan juga memerlukan lebih dari sekedar guru. Selain harus diprofesionalisasikan sehingga mampu menerapkan pengelolaan kegiatan belajar-mengajar de-

ngan pendekatan Cara Belajar Siswa Aktif yang dituntun oleh Wawasan Kependidikan, jelas di "garis depan" guru sekolah dasar harus dibantu oleh kepala sekolah, psikolog, konselor, ahli pengajaran remedial dan penilik. Sedangkan "di garis belakang" diperlukan bantuan ahli pengembangan kurikulum dan perangkat lunak pendidikan, ahli tes, dan sebagainya. Dengan perkataan lain, layanan ahli kependidikan tidak akan terwujud apabila hanya dilaksanakan oleh aktor tunggal yang diperlakukan sebagai tukang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ausubel, D.A.; Novak, J.D. dan Hanesian, H. *Educational Psychology: A Cognitive View*. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1978.
- Bloom, B.S. dkk. *Taxonomy of Educational Objectives, Handbook I: Cognitive Development*. New York: David McKay, 1956.
- Cartledge, G. dan Milburn, J.F. ed. *Teaching Social Skills to Children*. New York: Pergamon Press, 1986.
- Collins, E.C. dan Green, J.L. "Metaphors: The Construction of a Perspective", *Theory Into Practice* 29 (Spring 1990), hal. 71-77.
- Cole, N.L. "Conceptions of Educational Achievement", *Educational Researcher* 19 (April 1990), hal. 2-7.
- Cropley, A.J. *Lifelong Education: A Psychological Analysis*. Oxford, England: Pergamin Press Ltd., 1978.
- Ditjen Dikti. "Pokok-pokok Pikiran Mengenai Pendidikan Guru". Jakarta, 1989a.
- Ditjen Dikti. "Pengembangan Pendidikan Pra-Jabatan Guru Sekolah Dasar: Sebuah Pemikiran dalam Rangka Menyongsong Pendidikan Dasar 9 Tahun". Jakarta: Proyek Pengembangan Tenaga Kependidikan Ditjen Dikti, 1989b.
- Faure, E. ed. *Learning to Be*. Paris: Unesco, 1972.
- Houston, W.R.; Clift, R.T.; Freiber, H.J. dan Warner, A.R. *Touch the Future: Teach!* St. Paul: West Publishing Co., 1988.
- Johnson, D.W. dan Johnson, R.T. *Learning Together and Alone: Cooperative, Competitive, and Individualistic Learning*. Edisi II. New York: Prentice Hall, 1987.
- Jones, B.F. dkk. ed. *Strategic Teaching and Learning: Cognitive Instruction in the Content Areas*. Alexandria, V.A.: Association for Supervision and Curriculum Development, 1987.
- Joni, T. Raka. "Cara Belajar Siswa Aktif, Wawasan Kependidikan, Pembaharuan Pendidikan Guru". Pidato pengukuhan guru besar, IKIP Malang, 1983.
- Joni, T. Raka. "Pengembangan Kurikulum Pendidikan Guru: Penerapan dalam Program Studi Bahasa Indonesia". Naskah disajikan dalam Lokakarya Pengembangan Kurikulum Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Malang, 17 Oktober 1988.
- Joni, T. Raka. "Profesi Guru di Indonesia: Tawaran dan Tantangannya", *Analisis CSIS* (Juli-Agustus, 1989a), hal. 347-358.
- Joni, T. Raka. "Mereka Masa Depan, Sekarang: Tantangan Bagi Pendidikan Menyongsong Abad Informasi", Ceramah Ilmiah Lustrum VII IKIP Malang, 18 Oktober 1989b.

- Joni, T. Raka. "Cara Belajar Siswa Aktif: Artikulasi Konseptual, Jabaran Operasional dan Verifikasi Empiris (in press)", *Forum Penelitian*, Lembaga Penelitian IKIP Malang.
- Joni, R. Raka. dan Unen, J.A.M. Van. *Kerja Kelompok*. Jakarta: Proyek Pengembangan Pendidikan Guru, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1980.
- Joyce, B. dan Weil, M. *Models of Teaching*. New York: Prentice Hall, 1980.
- Kauffman, D.L. Jr. *Futurism and Future Studies*. Washington, D.C.: National Education Association, 1976.
- Krathwol, D.R. dkk. *Taxonomy of Educational Objectives, Handbook II: Affective Domain*. New York: David McKay, 1964.
- Marshall, H.H. "Work or Learning: Implications for Classroom Metaphor", *Educational Researcher* 17 (December 1988), hal. 9-16.
- Marshall, H.H. "Beyond the Workplace Metaphor: The Classroom as a Learning Setting". *Theory Into Practice* 29 (Spring 1990), hal. 94-101.
- Naisbitt, J. *Megatrends*. New York: Warner Books, 1982.
- Naisbitt, J. dan Aburdene, P. *Megatrends 2000*. New York: Avon Books, 1990.
- Parapak, J.L. *Perkembangan Teknologi Informasi dan Peranannya dalam Pembangunan Nasional*. Malang: Pusat Studi Agama dan Kebudayaan, 1990.
- Peterson, P.L. "Teachers and Students Cognitional Knowledge for Classroom Teaching and Learning", *Educational Researcher* 17 (Juni/July, 1988), hal. 5-14.
- Postman, N. *Teaching as a Conserving Activity*. New York: Dell Publishing Co., 1979.
- Postman, N. dan Weingartner, C. *Teaching as a Subversive Activity*. New York: Dell Publishing Co., 1969.
- Salim, Emil. "Tiga Jalur Benang Merah Memintal Indonesia Tahun 2000" dalam *Dialog: Indonesia Kini dan Esok*. hal. 59-80 diedit oleh Imam Waluyo dan Kons Kleden. Jakarta: Lembaga Pembangunan Nasional, 1981.
- Salim, Emil. "*Pembangunan Berwawasan Lingkungan*". Jakarta: LP3ES, 1986.
- Salim, Emil. "Sumber Daya Manusia dalam Perspektif", dalam *Analisis CSIS* (Mei-Juni 1989), hal. 191-205.
- Semiawan, Conny R. dkk. *Pendekatan Keterampilan Proses: Bagaimana Mengaktifkan Siswa dalam Belajar*. Jakarta: Gramedia, 1985.
- Shulman, L.S. "Knowledge and Teaching: Foundations of the New Reform", *Harvard Educational Review* 57 (1987), hal. 1-12.
- Silberman, M.L.; Allender, J.S. dan Janoff, J.M. *The Psychology of Open Learning: An Inquiry Approach*. Boston: Little, Brown and Co., 1972.
- Soedjatmoko. "Futorologi dan Kita: Suatu Uraian Pengantar" dalam *Dimensi Manusia dalam Pembangunan*. hal. 109-123 diedit oleh Aswab Mahasin. Jakarta: LP3ES, 1983.
- Toffler, A. *The Future Shock*. London: Pan Books Ltd., 1980.
- Toffler, A. *The Third Wave*. London: Pan Books Ltd., 1980.
- Wells, G. "Creating the Conditions to Encourage Literate Thinking", *Educational Leadership* 47 (1990), hal. 13-17.
- White, M.A. ed. *Curriculum for the Information Age*. Hillsdale, New York: Erlbaum, 1987.
- Witrock, M.C. ed. "Students' Thought Processes" dalam *Handbook of Research on Teaching*. Edisi III, hal. 297-314. New York: McMillan, 1986.